

# RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN  
P2KB



**TA 2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II</b>	
<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....</b>	<b>6</b>
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN P2KB .....	6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	51
2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	61
2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	86
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>94</b>
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	94
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	94
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	98
<b>BAB IV</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan P2KB Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Nunukan Tahun 2022 - 2026 dan juga mempertimbangkan hasil Musrenbang dan nPokir Dewan yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan P2KB untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan.

Tahun 2023 Kabupaten Nunukan melakukan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal yang mendasar pada perubahan adalah bergabungnya bidang Pengendalian Penduduk dan ke Dinas Kesehatan P2KB menjadi satu Bidang yang diberi nama Bidang Pengendalian Penduduk dan KB. Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nunukan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan,            2022  
Kepala,

Hj. Miskia, S.Si A.pt MM  
NIP 19740526 200112 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

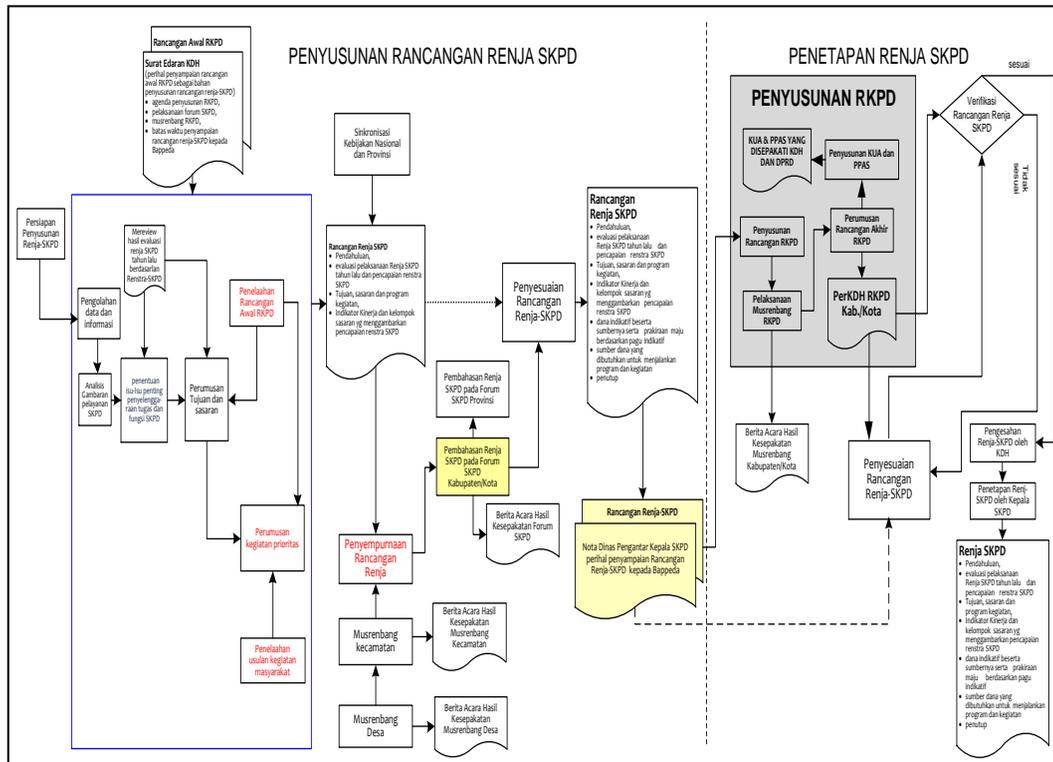
### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nunukan Periode 2022-2026 yang diturunkan ke Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan P2KB. Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan OPD satu tahun anggaran.

Kedudukan dan fungsi Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan Dinas Kesehatan P2KB dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB juga menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Tujuan disusunnya Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan di bidang kesehatan.

Penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh pemegang program di Dinas Kesehatan P2KB dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan P2KB dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Bagan alir penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat tersebut diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi OPD untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati.

Keterkaitan antara dokumen Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, adalah sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Renstra OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.
3. Dokumen Renja OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung prioritas Bupati terpilih.

4. Penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Penyusunan Renja OPD yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan rumah sakit;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Kerja Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan P2KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan;
26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perangkat Daerah 2021-2026.
27. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 844 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD Nunukan sebagai PPK BLUD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 tahun.

Tujuan disusunnya Renja OPD Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
2. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan
3. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran
4. Merupakan komitmen bersama
5. Melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

#### **Kata Pengantar**

#### **Daftar Isi**

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN**

#### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Renstra OPD**

Evaluasi renja tahun lalu seperti pada tabel berikut:

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7		8		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		16 = (15 / 6 * 100) %	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Kematian Ibu	-	Rp. 0	238 Per 100.00 0 KH	Rp. 55.386 .670.3 66	-	-	-	Rp. 4.541.57 8.158	-	8.20%	-	1,66 %
	Angka Kematian Bayi	-		11,7 per 1000 KH		-		-		-		-	
	Persentas e Puskesmas yang	-		88 Persen		-		-		-		-	

	terakreditasi nasional												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal			1 Unit	Rp. 11.862.471.891			1 Unit	Rp. 11.862.471.891	100%	100%		

	1:1000												
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Rp. 0	10 Unit	Rp. 5.150.000.000	-	-	3 Unit	Rp. 0	30,00 %	0,00 %	0,73 %	0,00 %
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	Rp. 0	3 Unit	Rp. 130.000.000	-	-	2 Unit	Rp. 0	66,67 %	0,00 %	66,67 %	0,00 %
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 paket	Rp. 0	70 paket	Rp. 1.975.762	-	-	25 paket	Rp. 0	35,71 %	0,00 %	62,50 %	0,00 %

Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 paket	Rp. 0	20 paket	Rp. 1.500.000.000	-	-	15 paket	Rp. 0	75,00 %	0,00 %	75,00 %	0,00 %
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			92 Paket	Rp. 368.965.000			30 Paket	Rp. 95.670.000	32.61%	25.90%		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	0 orang	Rp. 0	3.556 orang	Rp. 339.461.200	-	-	1.564 orang	Rp. 42.623.800	43,98 %	12,56 %	39,06 %	2,02 %

	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	Rp. 0	3.742 orang	Rp. 543.359.750	-	-	1.728 orang	Rp. 6.000.000	46,18 %	1,10 %	41,36 %	0,43 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	Rp. 0	3.403 orang	Rp. 74.999.800	-	-	105 orang	Rp. 7.050.000	3,09 %	9,40 %	2,76 %	1,73 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			11.675 Orang	Rp. 322.179.600			0 orang	Rp. 55.140.000	0,00%	17,10%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 orang	Rp. 0	20.048 orang	Rp. 11.000.000	-	-	9.743 orang	Rp. 11.100.000	48,60 %	100,91 %	43,53 %	2,01 %

	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	Rp. 0	33.000 orang	Rp. 61.755.000	-	-	8.040 orang	Rp. 2.550.000	24,36 %	4,13 %	20,10 %	0,24 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	Rp. 0	5.269 orang	Rp. 267.500.000	-	-	1.905 orang	Rp. 6.750.000	36,15 %	2,52 %	32,38 %	0,46 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			5.664 Orang	Rp. 4.800.000			1.420 Orang	Rp. 750.000	25.07%	15.60%		

	Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.306 Orang	Rp. 4.800.000			364 orang	Rp. 750.000	27.87%	15.60%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			297 Orang	Rp. 26.050.000			277 orang	Rp. 2.400.000	93.26%	9.20%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0 orang	Rp. 0	6.170 orang	Rp. 12.940.000	-	-	43 orang	Rp. 14.550.000	0,70 %	112,44 %	0,70 %	5,95 %

	Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 orang	Rp. 0	2.441 orang	Rp. 21.069.000	-	-	635 orang	Rp. 3.600.000	26,01 %	17,09 %	26,01 %	1,43 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 309.250.000	-	-	1 Dokumen	Rp. 169.685.000	100,00 %	54,87 %	20,00 %	15,30 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 0	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 613.478.000	-	-	1 Dokumen	Rp. 83.170.000	100,00 %	13,56 %	20,00 %	5,12 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	Rp. 158.942.800			0 Dokumen	Rp. 9.150.000	0,00%	5,80%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 116.232.900	-	-	0 Dokumen	Rp. 45.714.300	0,00 %	39,33 %	0,00 %	8,55 %

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 369.845.000	-	-	0 Dokumen	Rp. 50.880.000	0,00 %	13,76 %	0,00 %	8,93 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 9.944.000	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 50.254.000	-	-	0 Dokumen	Rp. 9.450.000	0,00 %	18,80 %	0,00 %	3,15 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatk			17 Orang	Rp. 4.800.000			5 Orang	Rp. 0	29,41%	0,00 %		

	an Pelayanan Kesehatan												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1 Orang	Rp. 55.332.200			0 Orang	Rp. 6.750.000	0,00 %	12.20%		
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 37.997.600	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 355.293.900	-	-	0 Dokumen	Rp. 164.000.000	0,00 %	46,16 %	0,00 %	14,20 %
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 17.315.781.908	-	-	1 Dokumen	Rp. 3.433.922.600	100,00 %	19,83 %	20,00 %	3,89 %

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				Rp. 1.800.000								
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				Rp. 2.730.000								
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 63.425.200	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Kabupaten/ Kota Sehat												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	Rp. 0	4 Dokumen	Rp. 5.000.000.000	-	-	2 Dokumen	Rp. 143.181.008	50,00 %	2,86 %	50,00 %	0,49 %
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 19.326.520.000	-	-	0 Dokumen	Rp. 47.349.450	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,05 %
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	Rp. 0	2 Dokumen	Rp. 900.000.000	-	-	1 Dokumen	Rp. 300.000.000	50,00 %	33,33 %	50,00 %	10,97 %
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	Rp. 0	18 Unit	Rp. 284.261.000	-	-	17 Unit	Rp. 0	94,44 %	0,00 %	80,95 %	0,00 %
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal			1 Dokumen	Rp. 147.230.000			1 Dokumen	Rp. 900.000	100.00%	0.60%		

Pemberian Obat Massal)	Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)												
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	Rp. 8.400.000			1 Dokumen	Rp. 1.200.000	100.00%	14.30%		
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	0 Unit	Rp. 0	1 Unit	Rp. 450.160.000	-	-	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Penangan n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)												
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>													
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data dan Informasi Kesehatan	0 Doku men	Rp. 0	3 Dokum en	Rp. 8.379. 346	-	-	0 Dokume n	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan	0 Doku men	Rp. 0	3 Dokum en	Rp. 9.660. 000	-	-	1 Dokume n	Rp. 0	33.33%	0,00 %		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>32,1</b>	<b>17,34</b>	<b>22,4 7</b>	<b>2,93</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentas e SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>90 persen</b>	<b>Rp. 196.88 2.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 490.030. 000</b>	<b>-</b>	<b>248,89 %</b>	<b>-</b>	<b>25,78 %</b>

<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>													
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes )	0 Orang	Rp. 0	0 Orang	Rp. 0	-	-	50 Orang	Rp. 482.350.000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/	0 orang	Rp. 0	3 orang	Rp. 196.882.400	-	-	0 orang	Rp. 7.680.000	0,00 %	3,90 %	0,00 %	0,42 %

	Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya												
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1,95</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase PKRT yang diawasi</b>	-	Rp. 0	100 persen	Rp. 0	-	-	-	Rp. 0	-	0 %	-	0 %
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 0	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Pengawas an serta Tindak Lanjut Pengawas an Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	0 Doku men	Rp. 0	1 Dokum en	Rp. 0	-	-	1 Dokume n	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	100, 00 %	0,00 %

	P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase desa yang melaksanakan STBM</b>	-	Rp. 0	75 persen	Rp. 49.486.700	-	-	-	Rp. 0	-	0 %	-	0 %
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	15,000,000	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	dan Pemberdayaan Masyarakat												
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	Rp. 0	3 Dokumen	16,486,700	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	0 Dokumen	Rp. 0	2 Dokumen	15,000,000	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Presentas e perangkat daerah (Dinas/Ba dan) yang menyusun dan memaanfa tkan rancangan induk pengendal ian penduduk	-	Rp. 0	20 persen	Rp 174,35 6,450	-	-	-	Rp. 0	-	0 %	-	0 %

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp 49,380,400	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp 2,984,500	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	Rp. 0	1 Laporan	Rp 9,967,000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0 Dokumen	Rp. 0	12 Dokumen	Rp 102,024,550	-	-	6 Dokumen	Rp. 0	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Frekuensi Pembinaan dan Monev Pencatatan dan	0 Kali	Rp. 0	2 Kali	Rp 10,000,000	-	-	0 Kali	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	pelaporan Program KKBP/Bangka Kencana												
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</b>	-	Rp. 0	71,47 persen	Rp. 0	-	-	-	Rp. 60.000.000	-	0 %	-	0 %
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>													
Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	0 Organisasi	Rp. 0	15 Organisasi	4,375,000	-	-	0 Organisasi	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	45,640,000	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	0 Dokumen	Rp. 0	2 Dokumen	50,000,000	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	kan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan	Rp. 0	8 Laporan	Rp. 296.400.000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	Rp. 0	9 Laporan	Rp. 953.990.000	-	-	0 Laporan	Rp. 60.000.000	0,00 %	6,29 %	0,00 %	6,29 %
Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	0 Laporan	Rp. 0	1 Laporan	Rp. 40.000.000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>													
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Frekuensi Pembinaan kepada Tenaga Penyuluh KB (PKB	0 Kali	Rp. 0	2 Kali	Rp. 14.930.000	-	-	0 Kali	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Program KKBPBK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan PLKB)													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD	0 Kader	Rp. 0	391 Kader	Rp. 1.152.000.000	-	-	0 Kader	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>													
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	0 Laporan	Rp. 0	18 Laporan	Rp. 8.100.000	-	-	18 Laporan	Rp. 0	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	dan Jejaringnya												
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 orang	Rp. 0	729 orang	Rp. 183.945.200	-	-	0 orang	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 unit	Rp. 0	1 unit	Rp. 19.250.880	-	-	0 unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	0 Laporan	Rp. 0	18 Laporan	Rp. 8.400.000	-	-	12 Laporan	Rp. 0	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Jejaringnya												
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	Rp. 0	4 Laporan	Rp. 74.975.600	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>													
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudu	0 Kampung	Rp. 0	30 Kampung	Rp. 517.500.000	-	-	0 Kampung	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	kan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB												
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>11,9</b>	<b>0,45</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase pelayanan KIE Kemitraan/ lembaga</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>45 persen</b>	<b>Rp 1,505,995,050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>													
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	0 kelompok	Rp. 0	10 kelompok	Rp 47,906,000	-	-	0 kelompok	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

dan Pemberda	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan												
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U	0 Unit	Rp. 0	7 Unit	Rp 117,000,000	-	-	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	PPKS)												
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	0 Laporan	Rp. 0	1 Laporan	Rp 39,999,550	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/P elatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan	0 orang	Rp. 0	50 orang	Rp 41,429,500	-	-	0 orang	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)												
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	0 orang	Rp. 0	720 orang	Rp 1,259,660,000	-	-	300 orang	Rp. 0	41,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>8,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>UNSUR PENUNJANG</b>													

URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Rp. 0	25 Dokumen	Rp. 136.603.400	-	-	25 Dokumen	Rp. 1.730.000	100,00 %	1,27 %	0,00 %	1,27 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	0 Laporan	Rp. 0	31 Laporan	Rp. 35.480.000	-	-	19 Laporan	Rp. 0	61,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/Bulan	Rp. 0	657 orang/Bulan	Rp. 77.970.702.329	-	-	1.314 orang/Bulan	Rp. 57.203.807.905	200,00 %	73,37 %	0,00 %	73,37 %
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	5 Paket	Rp. 17.500.800	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	40 Paket	Rp. 42.481.600	-	-	3 Paket	Rp. 13.750.000	7,50 %	32,37 %	0,00 %	32,37 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	0 Paket	Rp. 0	3 Paket	Rp. 131.943.600	-	-	4 Paket	Rp. 27.772.550	133,33 %	21,05 %	0,00 %	21,05 %

	yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	3 Paket	Rp. 69.999.750	-	-	4 Paket	Rp. 9.933.000	133,33 %	14,19 %	0,00 %	14,19 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Rp. 0	50 Laporan	Rp. 329.903.600	-	-	12 Laporan	Rp. 55.081.200	24,00 %	16,70 %	0,00 %	16,70 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	8 Paket	Rp. 69.409.400	-	-	3 Paket	Rp. 5.843.200	37,50 %	8,42 %	0,00 %	8,42 %
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	0 Laporan	Rp. 0	12 Laporan	Rp. 999.914.950	-	-	6 Laporan	Rp. 220.602.105	50,00 %	22,06 %	0,00 %	22,06 %

	n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Rp. 0	12 Laporan	Rp. 17.742.824.000	-	-	6 Laporan	Rp. 4.418.515.000	50,00 %	24,90 %	0,00 %	24,90 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan jasa Pemeliharaannya	0 unit	Rp. 0	1 unit	Rp. 20.000.000	-	-	0 unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0 unit	Rp. 0	40 unit	Rp. 82.495.000	-	-	6 unit	Rp. 9.380.500	15,00 %	11,37 %	0,00 %	11,37 %

	disediakan jasa Pemeliharaan lainnya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	Rp. 0	60 unit	Rp. 242.793.600	-	-	100 unit	Rp. 79.356.200	166,67 %	32,68 %	0,00 %	32,68 %
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>													
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 unit	Rp. 0	1 unit	Rp. 65.371.417.280	-	-	0 unit	Rp. 31.207.657.079	0,00 %	47,70%		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>69,9</b>	<b>18,46</b>	<b>0</b>	<b>18,46</b>
<b>Predikat kinerja</b>													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase tingkat capaian keberhasilan</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>100 persen</b>	<b>Rp. 161.643.470.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>

DAERAH KABUPATEN/KOTA	an pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Rp. 0	25 Dokumen	Rp. 136.603.400	-	-	0 Dokumen	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/Bulan	Rp. 0	657 orang/Bulan	Rp. 76.471.317.100	-	-	0 orang/Bulan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Rp. 0	31 Laporan	Rp. 35.480.000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	8 Paket	Rp. 69.409.400	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	40 Paket	Rp. 34.825.000	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	5 Paket	Rp. 17.500.800	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	3 Paket	Rp. 131.943.600	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Rp. 0	3 Paket	Rp. 69.999.750	-	-	0 Paket	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Rp. 0	50 Laporan	Rp. 329.928.000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Rp. 0	12 Laporan	Rp. 999.914.950	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Rp. 0	12 Laporan	Rp. 17.744.408.000	-	-	0 Laporan	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	Rp. 0	60 unit	Rp. 224.575.000	-	-	0 unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan jasa Pemeliharaannya	0 unit	Rp. 0	20 unit	Rp. 87.495.000	-	-	0 unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan jasa Pemeliharaannya	0 unit	Rp. 0	1 unit	Rp. 20.000.000	-	-	0 unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan P2KB**

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan P2KB yang diukur/dinilai yaitu indikator yang masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan P2KB periode Renstra 2021-2026 Kabupaten Nunukan yang termuat dalam dokumen. Adapun realisasi kinerja Dinas Kesehatan P2KB tahun 2022 seperti pada tabel berikut

Tabel Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan P2KB Tahun 2022

No	Tujuan OPD	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH		Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	211/100.000 KH	137/100.000 KH	135%	Melebihi Target
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	11,4/1.000 KH	7,96/1000 KH	130%	Melebihi Target


Prevalensi stunting pada balita	17,5 %	16,7%	105%	Melebihi Target
Jumlah puskesmas yang terakreditasi	16	16	100%	Sesuai Target
Jumlah rumah sakit yang terakreditasi nasional	2	1	50%	Tidak memenuhi target

2	Meningkatnya akses layanan kesehatan masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan	72%	88%	122%	Melebihi Target
---	---	-----------------------------	-----	-----	------	-----------------

- **AKI**

Realisasi kinerja pada AKI yaitu 137/100.000 KH dari target yang ditetapkan 211/100.000 KH pada tahun 2022. Artinya, kinerja indikator AKI melebihi target. Kematian ibu terus mengalami penurunan . Adapun usaha yang dilakukan untuk menekan AKI yaitu:

- 1) Memaksimalkan dana Jampersal untuk kegiatan pelayanan ibu hamil.
- 2) Meningkatkan kerjasama lintas sektor terutama pada Kerjasama pelayanan rujukan.
- 3) **Inovasi:** Inovasi pelayanan khususnya pada pelayanan rujukan.

Terlambat merujuk dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil di Kabupaten Nunukan. Kinerja pelayanan rujukan belum maksimal. Kematian ibu terbanyak di RSUD 76,47%.

Terlambat merujuk tidak boleh terjadi, apalagi kondisi Kabupaten Nunukan yang memiliki geografis yang unik yaitu daerah yang memiliki kepulauan, perbatasan dan terpencil. Penelitian yang dilakukan oleh Wiludjeng LK, dkk (2015) menunjukkan bahwa geografis mempengaruhi derajat kesehatan karena geografis dapat menyebabkan maldistribusi tenaga kesehatan. Daerah yang sulit dijangkau tidak menarik minat tenaga kesehatan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asmadi (2017) yaitu terlambat merujuk menjadi penyebab pasien tidak tertolong. Transportasi sungai sangat menyulitkan upaya pelayanan kesehatan terutama kasus gawat darurat karena transportasi sungai sangat bergantung pada kondisi alam.

Dari laporan RSUD disampaikan bahwa penyebab kematian di RSUD karena keterlambatan merujuk, pasien yang sampai di RSUD adalah pasien yang kondisinya sudah tidak baik sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Penyebab keterlambatan rujukan pasien:

1. Tidak ada mobil ambulans yang tersedia digunakan untuk merujuk
2. Kualitas ANC yang masih rendah
3. Pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang kesehatan ibu hamil yang masih rendah
4. Jarak antara rumah ke RS relatif jauh
5. Tidak ada bidan pada jam kerja

Masalah kematian ibu merupakan masalah besar, penting dan harus segera ditangani. Kematian ibu merupakan cerminan dari kinerja pembangunan pada sektor kesehatan dan menentukan nasib bangsa ke depan. Kemajuan suatu negara pada hakikatnya tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu, karena dari kesehatan seorang ibu yang baik maka akan terlahir generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Semua orang terlahir dari rahim seorang ibu, maka tidak boleh ada satu orangpun ibu hamil yang meninggal. Perbaikan kualitas ANC (*Antenatal Care*) mutlak diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya kematian ibu.

Kualitas ANC yang masih rendah merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan pemecahan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Hadi Kurniati (2020) bahwa ANC salah satu sarana informasi yang penting bagi ibu hamil untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan selama kehamilan.

Kartu skor, kriteria merujuk dan tempat merujuk yang digunakan oleh bidan puskesmas sudah tidak relevan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual sehingga potensi keterlambatan merujuk sangat besar terutama pada daerah yang memiliki geografis yang sulit seperti kabupaten Nunukan.

SIRUDITAMA kepanjangan dari Sistem Rujukan Dini Terencana Pada Maternal. SIRUDITAMA merupakan inovasi pelayanan kesehatan berupa kartu skor yang digunakan oleh bidan untuk menentukan status rujuk atau tidak di ibu hamil. SIRUDITAMA muncul karena kartu skor yang lama dari kementerian kesehatan sudah tidak relevan, tidak sesuai PMK yang baru. SIRUDITAMA merupakan inovasi oleh seorang bidan di Puskesmas, sampai saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kesehatan untuk penggunaan SIRUDITAMA secara menyeluruh.

- **AKB**

Realisasi kinerja AKB yaitu 7,96 per 1.000 KH dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 11,4 per 1.000 KH. Indikator AKB melebihi target yang telah ditetapkan.

- Prevalensi stunting pada balita



Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdapat beberapa definisi stunting dari berbagai sumber, seperti definisi berikut ini :

- Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus dua (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.
- Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan didefinisikan terhambat gizinya jika tinggi badan mereka terhadap usia lebih dari dua deviasi standar di bawah median standar pertumbuhan anak WHO. Suatu masyarakat atau wilayah disebut tidak mempunyai masalah kesehatan masyarakat, termasuk stunting, apabila 95% balita berstatus gizi antara -2 SD s/d +2 SD,

Kinerja pada indikator prevalensi stunting yaitu realisasi yang dicapai 16,6% sedangkan target yang ditetapkan 17,5%. Sedangkan capaian yang diperoleh yaitu 105%. Stunting berhasil diturunkan dengan upaya:

1. Memperbaiki data
2. Kunjungan lapangan dan pemberian makanan tambahan pada balita tidak mampu
3. Memperkuat edukasi calon pengantin

- **Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi**

Akreditasi puskesmas memenuhi target, yaitu pada tahun 2022 ditetapkan target 16 Puskesmas yang terakreditasi dan kondisi tahun 2022 terdapat 16 Puskesmas yang sudah lulus akreditasi.

- **Jumlah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Terakreditasi**

Tahun 2022 ditetapkan 2 rumah sakit yang lulus akreditasi sedangkan realisasinya hanya 1 rumah sakit yang terakreditasi yaitu RSUD Nunukan. Sementara, RSP Sebatik yang direncanakan terakreditasi belum terealisasi dikarenakan belum mendapat jadwal survei akreditasi dari Kementerian Kesehatan.

- **Cakupan pelayanan kesehatan**

Realisasi kinerja pada indikator cakupan pelayanan kesehatan yaitu 88% dari target yang ditetapkan sebesar 72% pada tahun 2022, sedangkan realisasinya 122% artinya kinerja indikator pelayanan kesehatan melebihi target hal ini sejalan dengan kasus Covid-19 yang semakin menurun dan

Kabupaten Nunukan sempat mencatat nol kasus pada tahun 2022. Kondisi menggambarkan bahwa sektor kesehatan berangsur-angsur pulih.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan OPD**

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2022 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan P2KB dalam rangka mencapai Indikator tujuan, indikator sasaran sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		LOKASI KEGIATAN(Kecamatan/Desa)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN(Kecamatan/Desa)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Menyelenggarakan P1, P2 dan P3</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>100%</b>	<b>316,347,867.00</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>100%</b>	<b>316,347,867.00</b>

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dukungan manajemen puskesmas	18 Puskesmas	100%	150,000,000.00	18 Puskesmas	100%	150,000,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes dan UPT	12 Bulan	65,494,333,807.80	Dinkes dan UPT	12 Bulan	65,494,333,807.80
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Rekon keuangan dan aset yang dilaksanakan	Kab. Nunukan	2 Dokumen	-	Kab. Nunukan	2 Dokumen	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia jasa komunikasi, air dan listrik	OPD Dinkes	1 unit	1,000,000,000.00	OPD Dinkes	1 unit	1,000,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan	OPD Dinkes	230 unit	150,000,000.00	OPD Dinkes	230 unit	150,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tenaga honorer yang mendapatkan gaji	OPD Dinkes	12 bulan	21,000,000,000.00	OPD Dinkes	12 bulan	21,000,000,000.00
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia bahan logistik kantor	OPD Dinkes	25 unit	-	OPD Dinkes	25 unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia jasa perbaikan kantor	OPD Dinkes	22 unit	100,000,000.00	OPD Dinkes	22 unit	100,000,000.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia ATK dan bahan pemberish	OPD Dinkes	23 unit	324,665,636.00	OPD Dinkes	23 unit	324,665,636.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia barang cetak dan ganda	OPD Dinkes	23 unit	150,000,000.00	OPD Dinkes	23 unit	150,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	OPD Dinkes	23 unit	100,000,000.00	OPD Dinkes	23 unit	100,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	OPD Dinkes	23 unit	200,000,000.00	OPD Dinkes	23 unit	200,000,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia peralatan rumah tangga	OPD Dinkes	23 unit	80,000,000.00	OPD Dinkes	23 unit	80,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	OPD Dinkes	4 eks	-	OPD Dinkes	4 eks	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dinas dan UPTD yang tersedia makan dan minum	OPD Dinkes	2 unit	31,000,000.00	OPD Dinkes	2 unit	31,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	OPD Dinkes	20 kali	200,000,000.00	OPD Dinkes	20 kali	200,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	OPD Dinkes	21 kali	166,347,867.00	OPD Dinkes	21 kali	166,347,867.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung perkantoran yang mendapatkan pemeliharaan	OPD Dinkes	2 gedung	22,497,280.00	OPD Dinkes	2 gedung	22,497,280.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Tenaga yang mengikut Bimtek perundang-undangan	OPD Dinkes	18 Org	-	OPD Dinkes	18 Org	-
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase penyediaan fasilitas layanan kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan Kabupaten sesuai PMK 44 tahun 2016	UPT Dinkes	22 UPT		UPT Dinkes	22 UPT	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil	FKTP	86%	150,000,000	FKTP	86%	150,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Ibu bersalin di fasilitas kesehatan	FKTP	86%	2,018,615,333	FKTP	86%	2,018,615,333

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan kunjungan neonatal (KN3)	FKTP DAN FKTL	100%	131,943,903	FKTP DAN FKTL	100%	131,943,903
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan balita	FKTP DAN FKTL	100%	90,500,000	FKTP DAN FKTL	100%	90,500,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan pelayanan anak sekolah	21 Kecamatan	100%	-	21 Kecamatan	100%	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk Usia 15 - 59 th yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	21 Kecamatan	100%	-	21 Kecamatan	100%	-

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	21 Kecamatan	61%	-	21 Kecamatan	61%	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas yang melaksanakan Kesjaor	18 Puskesmas	60%	30,000,000	18 Puskesmas	60%	30,000,000
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peroangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							

<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase penyediaan fasilitas layanan kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan Kabupaten sesuai PMK 44 tahun 2016</b>	<b>UPT Dinkes</b>	<b>22 UPT</b>		<b>UPT Dinkes</b>	<b>22 UPT</b>	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Sembakung	100%	8,000,000,000	Sembakung	100%	8,000,000,000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang direhab	3 pustu	100%	320,000,000	3 pustu	100%	320,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah Dinas Kesehatan P2KB yang dipelihara	1 Rumdis	100%	-	1 Rumdis	100%	-
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance yang diadakan IPAL yang dibangun	RSUD, RSP Sebatik, Lumbis, Tj. Harapan dan Pembeliangan	100%	3,425,000,000	RSUD, RSP Sebatik, Lumbis, Tj. Harapan dan Pembeliangan	100%	3,425,000,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang memiliki alat Kesehatan yang lengkap	18 Puskesmas	100%	17,704,054,748	18 Puskesmas	100%	17,704,054,748

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang di perbaiki/dipelihara	UPT Dinkes	5 jenis	229,100,000	UPT Dinkes	5 jenis	229,100,000
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipelihara	RSUD	100%	38,435,250,000	RSUD	100%	38,435,250,000
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase penyediaan fasilitas layanan kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan Kabupaten sesuai PMK 44 tahun 2016</b>	<b>UPT Dinkes</b>	<b>22 UPT</b>		<b>UPT Dinkes</b>	<b>22 UPT</b>	

Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan Obat di FKTP tingkat pertama	18 Puskesmas dan RSP	95%	4,838,837,879	18 Puskesmas dan RSP	95%	4,838,837,879
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan BMHP di FKTP tingkat pertama	18 Puskesmas dan RSP	95%	2,261,406,744	18 Puskesmas dan RSP	95%	2,261,406,744
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya akses layanan masyarakat</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan deteksi ODGJ di pkm	18 Puskesmas	18 PKM	-	18 Puskesmas	18 PKM	-

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pengendalian PTM dan P2 secara terpadu	18 Puskesmas	100%	2,141,860,000	18 Puskesmas	100%	2,141,860,000
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya akses layanan masyarakat</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Persentase pelayanan pada balita gizi buruk	Kabupaten Nunukan	100%	850,000,000	Kabupaten Nunukan	100%	850,000,000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses layanan masyarakat	18 Puskesmas	65%		18 Puskesmas	65%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa STBM	Kabupaten Nunukan	30%	50,000,000	Kabupaten Nunukan	30%	50,000,000
Pengelolaan surveilans kesehatan	Pencegahan potensi KLB	18 Puskesmas	69%	-	18 Puskesmas	69%	-

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase upaya pelayanan kesehatan khusus yang dilayani	Puskesmas Nunukan san Sei Nyamuk	100%	38,000,000	Puskesmas Nunukan san Sei Nyamuk	100%	38,000,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pengendalian PTM dan P2 secara terpadu	18 Puskesmas	100%	-	18 Puskesmas	100%	-
Pengelolaan surveilans kesehatan	Pencegahan potensi KLB	18 Puskesmas	69%	10,000,000.00	18 Puskesmas	69%	10,000,000.00
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya akses layanan masyarakat</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>	

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kabupaten Nunukan yang mendapatkan jaminan kesehatan	Kab. Nunukan	100%	7,142,367,895	Kab. Nunukan	100%	7,142,367,895
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya akses layanan masyarakat</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>	
Operasional pelayanan Rumah Sakit	Presentase Base Occupancy Rate (BOR)	4 RS	68%	57,309,913,550.00	4 RS	68%	57,309,913,550.00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Akreditasi Labkesda	Labkesda Kab Nunukan	Akreditasi penuh	178,000,000.00	Labkesda Kab Nunukan	Akreditasi penuh	178,000,000.00

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	54,571,000	GFK	100%	445,595,483	GFK	100%	445,595,483
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pasien rujukan yang mendapatkan pendampingan	17 Puskesmas	100%	613,129,137.00	17 Puskesmas	100%	613,129,137.00
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya akses layanan masyarakat</b>	<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>		<b>18 Puskesmas</b>	<b>65%</b>	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang beroperasi	12 PKM	100%	22,736,961,868	12 PKM	100%	22,736,961,868

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang re-akreditasi	5 PKM	100%	1,015,210,000	5 PKM	100%	1,015,210,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>							
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persenatse tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan dan bimtek</b>	DINKES	2 Orang		DINKES	2 Orang	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat PKP	DINKES	2 Orang	150,000,000	DINKES	2 Orang	150,000,000

<b>Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>							
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pangan, obat, OPTIKAL dan bahan Berbahaya yang diawasi	Kabupaten Nunukan	70%	49,441,985	Kabupaten Nunukan	70%	49,441,985
<b>Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>							

<p><b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b></p>	<p><b>Persentase Pangan, obat dan bahan Berbahaya yang diawasi</b></p>	<p><b>Kabupaten Nunukan</b></p>	<p><b>70%</b></p>		<p><b>Kabupaten Nunukan</b></p>	<p><b>70%</b></p>	
---	--	---------------------------------	-------------------	--	---------------------------------	-------------------	--

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana penyedia jasa boga yang diawasi	Kabupaten Nunukan	75%	469,110,000	Kabupaten Nunukan	75%	469,110,000
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>							

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis media penyebaran informasi kesehatan	Kabupaten Nunukan	2 jenis		Kabupaten Nunukan	2 jenis	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media penyebaran informasi kesehatan	Kabupaten Nunukan	2 jenis	1,555,492,532	Kabupaten Nunukan	2 jenis	1,555,492,532
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Wilker Puskesmas	60%	275,000,000	Wilker Puskesmas	60%	275,000,000

<b>Jumlah</b>	<b>261,833,635,648.1 3</b>			<b>261,833,635,648.13</b>
---------------	--------------------------------	--	--	---------------------------

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2022 untuk Tahun 2023. Usulan masyarakat yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi prioritas penanggaran pada Tahun Anggaran 2023 yang sejalan dengan arah kebijakan penganggaran kesehatan yaitu pemenuhan SPM. Ada 111 usulan dari Musrenbang Kecamatan untuk sektor kesehatan seperti tabel berikut:

Rekapan Usulan Hasil Musranbang Kecamatan TA 2023 Sektor Kesehatan

No	USULAN	JUMLAH USULAN	LOKASI	Tanggapan OPD
1	Pembangunan Puskesmas	Belum tersedianya Puskesmas di Kecamatan  <b>(2 usulan)</b>	Krayan Tengah (Binuang) dan Lumbis Ogong (Tau Lumbis)	Belum bisa dianggarkan  karena Keterbatasan SDM, Operasional  dan Sarana Prasarana Penunjang lainnya
2	Pembangunan Faskes lainnya (Pustu)	Belum tersedianya PUSTU di Desa <b>(13 usulan)</b>	Krayan (Wa' Yanud), Krayan Barat (Lembada, Pa' Kidang), Lumbis (Pa'loo), Sembakung Atulai (Katul, Tulang, Katul), Tulin Onsoi (Balatikon, Kalunsayan),  Sembakung (Lubakan, Manuk Bungkul, Pagar, Tagul)	Diupayakan melalui dana Bankeu dan Dana Desa
3	Rehabilitasi Faskes lainnya (Pustu)	Perbaikan Pustu ringan s/d Berat <b>(19 usulan)</b>	Tulin Onsoi (Naputi, Sekikilan, Tinampak II), Krayan Barat (Berian Baru, Liang Turan, Sembudud), Lumbis (Patal II), Nunukan Selatan (Mansapa, Tanjung Harapan), Sebatik (Balansiku), Sebatik Tengah (Sungai Limau), Sebatik Barat (Binalawan, Liang bunyu, Setabu), Sembakung (Butas Bagu, Tepian),	Pustu Sungai Limau (Sebatik tengah) sudah dilakukan rehabilitasi TA. 2021 .

			Seimenggaris (Semaja)	Tahun 2023 dianggarkan 3 pustu (Sekikilan, Semaja dan Lembudud)
4	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu <b>(13 usulan)</b>	Krayan Barat (Lepatar, Liang Bua, Liang Turan, Pa' Kidang, Pa' Lutut, Pa' Mering, Pa' Pani), Lumbis (Mansalong, Sapuyan, Tubus), Sebatik Tengah (Aji Kuning), Sebatik Timur (Sungai Nyamuk), Sebatik Tengah (Sungai Limau)	Pembayaran Peserta Bantuan Iuran (PBI) sudah dianggarkan di tahun 2023, untuk kepesertaan pendataan dilakukan oleh  DINSOS
5	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Belum tersedia Rumdis Tenaga Medis di RSP Dan di Puskesmas <b>(8 Usulan (Pkm/pustu)</b>	- Rumah Sakit Pratama - Krayan Barat (Long Mangan, Pa' Mering)  - Krayan Tengah (Binuang), Lumbis (Likos, Sapuyan), Lumbis Ogong (Semata, Tau Lumbis, Ubol Alung), Sebatik (Sungai Manurung)	Rumah Dinas Tenaga Medis akan diusulkan melalui APBN PUPR 2023
6	Pemenuhan Tenaga Kesehatan (di pustu)	Tidak ada tenaga di Pustu  <b>(4 usulan)</b>	Tulin Onsoi (Tembalang), Sembakung (Tagul dan Tepian), Sei Menggaris (Semaja)	Diusulkan melalui penerimaan CPNS/P3K

7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum adanya ambulance di desa dan Poskesdes	Desa Manuk Bungkul (Sembakung), Seimenggaris (Semaja) Poskesdes Sungai Nyamuk	Ambulance hanya diperuntukkan untuk puskesmas
		Pengadaan mobil jenazah	Nunukan selatan	Diupayakan melalui DAK Fisik TA.2023
		Pengadaan Speedboat Penunjang Kesehatan	Sungai Nyamuk	Belum bisa dianggarkan karena keterbatasan operasional
		Genset/Mesin Lampu Puskesmas	Puskesmas sei Taiwan - Sebatik	Diupayakan melalui dana Kapitasi Puskesmas
		perlunya ada sarana dan prasarana puskesmas (Kipas Angin, Kursi dan Tandon Air serta mainan anak-anak)	Puskesmas Aji Kuning – Sebatik Tengah	Diupayakan melalui dana kapitasi
8	Rehab dan Pemeliharaan Puskesmas	Belum adanya Paving Blok, pagar dan parkir Puskesmas	Puskesmas sei Taiwan - Sebatik	Sudah dianggarkan di tahun 2021 untuk paving blok, pondasi pagar serta rehab ringan puskesmas
		Belum adanya mushola di Puskesmas	Puskesmas Sebatik Barat dan Aji Kuning	Masih bisa memanfaatkan ruangan yang ada
		Belum adanya Paving Blok dan Pagar Puskesmas	Puskesmas Lapri – Sebatik Utara	Belum bisa dianggarkan karen Keterbatasan anggaran
		Gedung UGD yang kondisi saat ini rusak berat, sehingga perlunya rehab total UGD PKM Sanur	Tulin Onsoi - Sanur	Akan diupayakan melalui DANA DAK TA.2023

		Instalasi Listrik yang kurang mendukung, perlunya peningkatan Instalasi listrik di Puskesmas & UGD.	Tulin Onsoi - Sanur	Diupayakan melalui dana kapitasi
9	Penanganan stunting	Sosialisasi Pencegahan Stunting di  Kelurahan Nunukan Tengah	Nunukan (Nunukan Tengah)	Sudah dianggarkan di TA.2023
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Adanya orang mengalami gangguan jiwa yang perlu penanganan	Sebatik Utara (Seberang)	Sudah dianggarkan di TA.2023
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengadaan Pelayanan Fogging dan Bubuk ABATE	Nunukan (Nnk Barat) Sebatik Tengah (Sungai Limau)	Sudah dianggarkan di TA.2023
12	Penyuluhan kesehatan	Penyuluhan Kesehatan	Nunukan Barat, Sebatik Timur (Tanjung Aru)	Merupakan kegiatan rutin Puskesmas
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Minimnya fasilitas olah raga di desa	Sebuku (Kekayap, Kunyit), Sebatik Tengah (Sungai Limau)	Fasilitas Olah Raga lebih ditekankan pada pemberdayaan

				masyarakat
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya alat kesehatan di pustu	Sebatik (Iordes, S.Limau)	Dianggarkan di TA.2023
15	Pengadaan obat dan BMHP	kurangnya alkes dan alat pemeriksaan gula darah, kolestrol dan asam urat di Puskesmas	Sebatik Tengah (Sungai Limau), Tulin Onsoi (Salang)	Sudah dianggarkan di TA.2023

## Rekapan Tanggapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	USULAN	PERMASALAHAN	KECAMATAN	LOKASI	Tanggapan OPD
1	Pengadaan Rumah Dinas tenaga kesehatan	Saat ini para petugas kesehatan ditampung dalam 1 rumah yang sudah tidak memadai karena petugas kesehatan yang cukup banyak.	Krayan Selatan	Long Budung	Diusulkan melalui DAK FISIK KESEHATAN / Bankeu TA.2023
2	Pembangunan Gedung Puskesmas (Pustu)	Pemukiman Desa Pagar direlokasi dari fasilitas kesehatan sehingga perlu ada pembangunan pustu untuk memudahkan warga masyarakat yang sakit memperoleh pengobatan	Sembakung	Pagar	Diupayakan melalui dana Bankeu dan Dana Desa
3		Saat ini tidak ada bangunan PUSTU	Lumbis Ogong	Sumentobol	Diupayakan melalui dana Bankeu dan Dana Desa
4		Pembangunan PUSTU (Pembantu Puskesmas) sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masih jauh dari jangkauan puskesmas	Tulin Onsoi	Sekikilan	Sudah Ada Pustu di Sekikilan, jika diperlukan akan dilakukan pemeliharaan

5	Pengadaan Rumah Dinas / Rumah Singgah Tenaga Medis RS Pratama	Sudah 7 (tujuh) tahun lebih bangunan rumah sakit selesai namun sampai sekarang belum di gunakan alias terlantar karena tidak ada sarana kesehatan dan tenaga medis.	Sebuku	Pembelian	Diusulkan melalui APBN PUPR TA.2024
6	Pemeliharaan Gedung RS Pratama	Sudah 7 (tujuh) tahun lebih bangunan rumah sakit selesai namun sampai sekarang belum dapat digunakan karena tidak adanya tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sebuku	Sebuku	Pembelian	Saat ini RSP Sebuku sudah beroperasi, SDM, Alat Kesehatan sudah digunakan utk pelayanan masyarakat dan akan terus ditingkatkan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Dengan diketahuinya tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan dikabupaten Nunukan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan Dinas Kesehatan P2KB yang telah dirumuskan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable*,

*result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses layanan kesehatan
- 2) Meningkatnya mutu layanan kesehatan

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan P2KB seperti pada tabel berikut

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.		Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
					Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
	<b>Tujuan:</b>									
	<b>Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat</b>									
	Indikator tujuan	AHH		71,35	71,37	71,40	71,42	71,45	71,50	71,50
	<b>Sasaran:</b>									
<b>1</b>	<b>Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat</b>									
	Indikator sasaran	1.AKI	Per 100.000 KH	265	238	211	185	158	132	132
		2.AKB	Per 1.000 KH	11,9	11,7	11,4	11	10,9	10,6	10,6
		3. Prevalensi Stunting	Persen	21,97	17,5	15,5	14	13	12	12

		4. Persentase Puskesmas yang terakreditasi nasional	Persen	88	88	94	100	100	100	100
		5. Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang terakreditasi nasional	Persen	50	50	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat</b>									
	Indikator sasaran	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen	69	69	71	71	73	73	73

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Kesehatan P2KB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk - produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM Kesehatan dan target RPJMD.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa masalah utama bidang kesehatan di Kabupaten Nunukan adalah AKI yang perlu ditekan. Target kinerja pada AKI mencapai target yang telah ditentukan Dinas Kesehatan P2KB pada tahun 2022 akan tetapi AKI harus terus diturunkan, sehingga dilakukan upaya-upaya kesehatan melalui program dan kegiatan yang ditujukan kepada daerah-daerah atau masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan berkaitan dengan kesehatan ibu yaitu di daerah kepulauan seperti pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Daratan terpencil seperti Daerah Sanur/Tulin Onsoi dan Daerah perusahaan seperti di Seimenggaris.

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Dinas Kesehatan P2KB pada tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T			Jumlah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>135,447,311,207</b>	<b>11,178,462,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,625,773,702</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>98,628,985,622</b>	<b>274,310,292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,903,295,914</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>136,580,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,580,000</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>02</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		136,580,000	0	0	0	136,580,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>79,533,142,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,533,142,797</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		79,386,432,797	0	0	0	79,386,432,797	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>04</b>	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,710,000	0	0	0	106,710,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>05</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		40,000,000	0	0	0	40,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>04</b>	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	0	0	0	50,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>600,683,365</b>	<b>95,865,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,548,745</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		49,999,180	0	0	0	49,999,180	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		0	95,865,380	0	0	95,865,380	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		16,830,000	0	0	0	16,830,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189,950,585	0	0	0	189,950,585	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		343,903,600	0	0	0	343,903,600	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>17,805,430,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,805,430,590</b>	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		999,845,150	0	0	0	999,845,150	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,805,585,440	0	0	0	16,805,585,440	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>503,148,870</b>	<b>8,415,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,563,870</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		216,148,870	8,415,000	0	0	224,563,870	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		87,000,000	0	0	0	87,000,000	
1	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		200,000,000	0	0	0	200,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.10</b>		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				<b>0</b>	<b>170,029,912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,029,912</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	170,029,912	0	0	170,029,912	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>33,886,710,254</b>	<b>10,904,152,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,790,862,457</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>13,306,017,225</b>	<b>10,846,732,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,152,749,428</b>	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,900,000	580,320,000	0	0	701,220,000	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Sebatik, Sungai Manurung Kab. Nunukan, Nunukan Timur Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan		399,598,000	1,464,330,000	0	0	1,863,928,000	
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,100,000	580,277,500	0	0	598,377,500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,080,000	2,298,591,400	0	0	2,418,671,400	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,681,600	5,923,213,303	0	0	6,283,894,903	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,997,200	0	0	0	149,997,200	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,277,509,718	0	0	0	7,277,509,718	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			4,749,170,707	0	0	0	4,749,170,707	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		109,980,000	0	0	0	109,980,000	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>20,532,877,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,532,877,029</b>	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		192,978,897	0	0	0	192,978,897	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		685,461,720	0	0	0	685,461,720	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		148,149,725	0	0	0	148,149,725	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		153,062,580	0	0	0	153,062,580	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		133,107,600	0	0	0	133,107,600	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		249,878,760	0	0	0	249,878,760	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		219,999,690	0	0	0	219,999,690	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		9,873,600	0	0	0	9,873,600	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		103,134,640	0	0	0	103,134,640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		109,339,940	0	0	0	109,339,940	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		53,075,000	0	0	0	53,075,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		53,149,745	0	0	0	53,149,745	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		133,400,000	0	0	0	133,400,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		51,970,000	0	0	0	51,970,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		69,962,250	0	0	0	69,962,250	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		36,610,000	0	0	0	36,610,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,995,000	0	0	0	49,995,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		41,380,500	0	0	0	41,380,500	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		135,000,000	0	0	0	135,000,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		271,927,400	0	0	0	271,927,400	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		215,581,640	0	0	0	215,581,640	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		14,590,800,000	0	0	0	14,590,800,000	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		39,990,000	0	0	0	39,990,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		19,972,782	0	0	0	19,972,782	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		154,999,970	0	0	0	154,999,970	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		879,929,500	0	0	0	879,929,500	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		500,000,000	0	0	0	500,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		620,147,000	0	0	0	620,147,000	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		579,999,090	0	0	0	579,999,090	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				<b>47,816,000</b>	<b>57,420,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,236,000</b>	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,740,000	27,500,000	0	0	55,240,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,076,000	29,920,000	0	0	49,996,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				1,594,403,011	0	0	0	1,594,403,011	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>				45,800,400	0	0	0	45,800,400	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,800,400	0	0	0	45,800,400	
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				1,548,602,611	0	0	0	1,548,602,611	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,548,602,611	0	0	0	1,548,602,611	
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>				361,694,170	0	0	0	361,694,170	
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>				29,999,410	0	0	0	29,999,410	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		29,999,410	0	0	0	29,999,410	
1	02	04	2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>				188,424,760	0	0	0	188,424,760	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		188,424,760	0	0	0	188,424,760	
1	02	04	2.06		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>				<b>143,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,270,000</b>	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan			143,270,000	0	0	0	143,270,000	
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				<b>975,518,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975,518,150</b>	
1	02	05	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>219,213,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,213,400</b>	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		219,213,400	0	0	0	219,213,400	
1	02	05	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>29,532,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,532,850</b>	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,532,850	0	0	0	29,532,850	
1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>726,771,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726,771,900</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			726,771,900	0	0	0	726,771,900	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>4,029,383,150</b>	<b>396,972,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,426,356,010</b>	
2	14	02			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>315,156,140</b>	<b>19,043,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,200,000</b>	
2	14	02	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>				<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,000,000</b>	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	0	0	0	18,000,000	
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
2	14	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>287,156,140</b>	<b>19,043,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,200,000</b>	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			956,140	19,043,860	0	0	20,000,000	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			168,000,000	0	0	0	168,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			54,000,000		0	0	0	54,000,000	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,200,000		0	0	0	64,200,000	
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>2,865,720,000</b>	<b>377,929,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,243,649,000</b>		
2	14	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>990,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990,350,000</b>		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000		0	0	0	80,000,000	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			150,000,000		0	0	0	150,000,000	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			247,000,000		0	0	0	247,000,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			433,350,000		0	0	0	433,350,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		80,000,000	0	0	0	80,000,000	
2	14	03	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>838,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838,000,000</b>	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			358,000,000	0	0	0	358,000,000	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			480,000,000	0	0	0	480,000,000	
2	14	03	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>532,370,000</b>	<b>377,929,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910,299,000</b>	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			16,200,000	0	0	0	16,200,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			324,470,000	0	0	0	324,470,000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			0	377,929,000	0	0	377,929,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,700,000	0	0	0	11,700,000	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			180,000,000	0	0	0	180,000,000	
2	14	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>				<b>505,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505,000,000</b>	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		9,000,000	0	0	0	9,000,000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			496,000,000	0	0	0	496,000,000	
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>848,507,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848,507,010</b>	
2	14	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>635,422,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,422,400</b>	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		360,000,000	0	0	0	360,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		67,522,400	0	0	0	67,522,400	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		207,900,000	0	0	0	207,900,000	
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>213,084,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,084,610</b>	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		16,084,110	0	0	0	16,084,110	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		101,967,500	0	0	0	101,967,500	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		95,033,000	0	0	0	95,033,000	

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Kinerja Utama sektor kesehatan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya hal ini tercermin dari indikator AKI, kasus kematian ibu mengalami penurunan, begitu juga dengan indikator AKB yaitu kematian bayi semakin menurun. Perbaikan kinerja harus terus menerus dilakukan dengan kerja yang terukur melalui dokumen perencanaan seperti penajaman dokumen Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan tahun 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan. Diharapkan upaya Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2023 dapat lebih terarah dan terukur.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan 2023 melibatkan seluruh pemegang program di Dinas Kesehatan P2KB dan UPT Dinas Kesehatan P2KB. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran kesehatan di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan, serta partisipasi masyarakat.